

**ANALISIS *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM
MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN
PT. PELABUHAN INDONESIA I
(PERSERO) MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh

**Nama : AF RIDHA BUANA
NPM : 1405170826
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
TAHUN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : AF RIDHA BUANA
NPM : 145170826
Jurusan : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN PT. PELABUHAN INDONESIA-I (BERSERO) MEDAN

Dinyatakan : (B) *Lulus dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

PANDAPOTAN RITONGA, SE, M.Si


SUKMADISLANA, SE, M.Si

IHSAN RAMBE, SE, M.Si

Panitia Ujian

Sekretaris


H. JAMBUR, SE, MM, M.Si


ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : AF RIDHA BUANA
N.P.M : 1405170826
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Skripsi : ANALISIS *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN
PT. PELABUHAN INDONESIA I (PERSERO) MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(IHSAN RAMBE, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : AF RIDHA BUANA
N.P.M : 1405170826
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Skripsi : ANALISIS *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM
MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN PT. PELABUHAN
INDONESIA I (PERSERO) MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
11/2018 /3	perbaiki pembaha. perbaiki pembaha. perbaiki pembaha.		
14/2018 /3	perbaiki pembaha.		
16/3 2018	perbaiki pembaha.		
19/2018 /3	Ace Liza Meja Alja		

Pembimbing Skripsi

IHSAN RAMBE, SE, M.Si

Medan, Maret 2018
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Af Ridha Buana
NPM : 1405170826
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : Analisis *Good Corporate Governance* Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa benar saya memperoleh data penelitian dari kantor dimana saya melakukan riset yaitu pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan yang berlokasi Jl. Krakatau Ujung No. 100 Tj. Mulia Medan-20241.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2018
Yang Membuat Pernyataan,



AF RIDHA BUANA
NPM.1405170826

ABSTRAK

AF RIDHA BUANA. NPM. 1405170826. Analisis *Good Corporate Governance* Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi 2018. PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) di Medan adalah perusahaan di bidang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana perusahaan tersebut bergerak dibidang jasa pelabuhan. *Good Corporate Governance* merupakan suatu tata kelolah perusahaan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran *good corporate governance* dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan yang kinerjanya diukur dengan Rasio Lancar, ROI, ROE, Perputaran Persediaan, TATO dan TMS serta dibandingkan dengan standar kinerja keuangan yang ditetapkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik analisis deskriptif yaitu metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklasifikasikan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa skor *Good Corporate Governance* yang meningkat belum mampu meningkatkan kinerja keuangan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan. Seperti ROI dan TATO yang menurun dan belum mampu memenuhi standar dari BUMN khususnya Rasio TATO.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance*, Rasio Lancar, Rasio Kas, ROI, ROE, Perputaran Persediaan, TATO, TMS.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatu.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmad dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan judul “**Analisis Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kinerja keuangan Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan**”. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan tepat waktu.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, Ayahanda tercinta **Selamat** dan Ibunda tercinta **Nur'aini Br. Tarigan** yang telah membanting tulang dan bekerja keras untuk membiayai saya selama kuliah, kemudian dukungan moral dan spiritual, Serta kakak-kakaku **Evi Pratiwi, S.E, Nasru Utami, S.pd, Siti Halima, S.Pd, dan adikku tersayang Muhammad Rasyid Ridho**, yang selalu menjadi motivator dan penyemangat penulis serta senantiasa mendo'akan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dan dalam kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan bimbingan. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Januri, S.E., M.Si, selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, S.E., M.Si, selaku Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih, S.E., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum, S.E., M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Seprida Hanum Harahap, S.E., M.Si, selaku dosen PA (Penasehat Akademik) kelas G Akuntansi Siang.
7. Bapak H. Ihsan Rambe, S.E., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan saran yang membangun sebagai masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Para Staff pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Syaiful selaku Manajer Perbendaharaan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan.
10. Seluruh sahabat-sahabat, penulis ucapkan terimakasih kepada Bumbun Embun Cii Tepo, Robbi Nurhidayah, Hendra Wira Yulanda, Muhammad Bayu Andika, Indri Ardiyanti, Wahyu Andika, Susi Rahayu.

11. Seluruh teman-teman Akuntansi G Siang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara semoga sukses selalu dan terimakasih atas kebersamaannya selama ini dan menjadikan dari proses menempuh pendidikan dibangku kuliah.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan dan saran yang berguna bagi kelengkapan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembacanya. Akhirnya segala bantuan, dorongan jasa dan kerjasama yang telah diberikan semua pihak, semoga mendapat ridho dan berkah dari Allah SWT.

Medan, Maret 2018
Penulis

AF RIDHA BUANA
NPM.1405170826

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
A. Uraian Teori.....	11
1. Good Corporate Governance.....	11
2. Teori Good Corporate Governance.....	13
3. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance.....	16
4. Tujuan Good Corporate Governance.....	21
5. Faktor-faktor Good Corporate Governance.....	22
6. Pengukuran terhadap pelaksanaan GCG.....	23
7. Kinerja Keuangan Perusahaan.....	27
8. Penelitian Terdahulu.....	33
B. Kerangka Berfikir.....	36

BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Pendekatan Penelitian.....	39
B. Definisi Operasional Variabel.....	39
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	45
1. Sejarah Perusahaan.....	45
2. Struktur Organisasi Perusahaan.....	47
A. Hasil Penelitian.....	52
B. Pembahasan Penelitian.....	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Piutang Usaha Tahun 2012-2016.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 3.1 Kegiatan Pelaksanaan Penelitian.....	42
Tabel 4.1 Penilaian Skor Indeks GCG.....	53
Tabel 4.2 Hasil Skor GCG PT.Pelabuhan Indonesia I (persero) Medan.....	53
Tabel 4.3 Rasio Lancar PT.Pelabuhan Indonesia I (persero) Medan.....	54
Tabel 4.4 ROI PT.Pelabuhan Indonesia I (persero) Medan.....	56
Tabel 4.5 ROE PT.Pelabuhan Indonesia I (persero) Medan.....	58
Tabel 4.6 TATO PT.Pelabuhan Indonesia I (persero) Medan.....	60
Tabel 4.7 PP PT.Pelabuhan Indonesia I (persero) Medan.....	62
Tabel 4.8 TMS PT.Pelabuhan Indonesia I (persero) Medan.....	64

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	38
Gambar 4.2 Rasio Lancar.....	55
Gambar 4.3 Return On Investment.....	57
Gambar 4.4 Return On Equity.....	59
Gambar 4.5 Total Asset Turn Over.....	61
Gambar 4.6 Inventory Turn Over.....	63
Gambar 4.7 Total Modal Sendiri.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan usaha di era sekarang yang sudah semakin kompetitif membuat perusahaan berusaha memperbaiki kinerja dan mengembangkan usaha mereka agar tetap bisa bertahan dan berkembang. Salah satu tujuan sebuah perusahaan didirikan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan tersebut dengan cara meningkatkan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham. Memaksimalkan nilai perusahaan bermakna luas dari memaksimalkan laba, didasarkan beberapa alasan yaitu memaksimalkan nilai berarti mempertimbangkan pengaruh waktu terhadap nilai uang, memaksimalkan nilai juga berarti mempertimbangkan berbagai risiko terhadap arus pendapatan perusahaan dan mutu dari arus dana yang diharapkan diterima dimasa yang akan datang.

Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya dapat digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan antara berbagai partisipasi dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Isu mengenai *corporate governance* mulai mengemuka, khususnya pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Banyak

pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan diIndonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan diIndonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *corporate governance*.

Corporate governance merupakan serangkaian mekanisme yang dapat melindungi pihak-pihak minoritas dari ekspropriasi yang dilakukan oleh para manajer dan pemegang saham pengendali dengan penekanan pada mekanisme legal. Ekspropriasi merupakan pencabutan hak milik perorangan untuk kepentingan umum yang disertai pemberian ganti rugi. Pendekatan legal dari *corporate governance* memiliki arti bahwa mekanisme kunci dari *corporate governance* adalah proteksi investor eksternal, baik pemegang saham maupun kreditur, melalui sistem legal, yang dapat diartikan dengan hukum dan pelaksanaannya.

Corporate governance adalah sistem yang bisa digunakan untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan. *Corporate governance* timbul dari kebutuhan usaha akan tata kelola perusahaan yang baik, yang menegakkan prinsip-prinsip transparan, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan berkeadilan.

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa penerapan *Corporate governance* bervariasi antar satu negara dengan negara lainnya. Penelitian-penelitian tersebut pada dasarnya menunjukkan adanya perbedaan sistem hukum yang melindungi investor antar negara (lihat, misal, La Porta, dkk., 2000). Perbedaan dalam sistem hukum tersebut selanjutnya akan berpengaruh pada struktur kepemilikan, perkembangan pasar modal, dan perekonomian suatu negara (lihat, misal, *review* artikel, La Porta, dkk., 2000).

Meskipun reputasi dan gagasan-gagasan yang dimiliki oleh para manajer dapat membantu dalam meraih dana, variasi dalam hukum dan pelaksanaannya merupakan hal utama dalam memahami mengapa perusahaan-perusahaan dalam beberapa negara lebih mudah mendapatkan dana dibanding perusahaan-perusahaan yang lainnya.

Jika *Corporate governance* merupakan faktor yang signifikan pada kondisi krisis, maka *corporate governance* tidak hanya mampu menjelaskan perbedaan kinerja antar negara selama periode krisis, akan tetapi juga perbedaan *corporate governance* ditingkat perusahaan masih sangat sedikit dilakukan. Penelitian dampak penerapan *corporate governance* pada kinerja sangat menarik untuk dilakukan pada periode krisis.

Menurut Cadbury seperti yang dikutip oleh Adrian Sutedi (2011) *good corporate governance* “mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai kesinambungan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan. Herdinata (2008), “*corporate governance* telah memainkan peran penting bagi *private sector* diseluruh dunia dan terintegrasinya pasar keuangan yang mendorong terciptanya kompetisi dan risiko dari mobilitas aliran modal”.

Kaihatu (2006), “Perkembangan terbaru membuktikan bahwa manajemen tidak cukup hanya memastikan bahwa proses pengelolaan manajemen berjalan dengan efisien. Diperlukan instrumen baru, yaitu *good corporate governance (gcg)* untuk memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik”.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai perusahaan penyumbang terbesar dalam perkembangan pembangunan di Indonesia, tidak luput bahkan

sering menjadi sorotan dari masyarakat maupun media dan mendapat berbagai bentuk kritikan atas kinerja perusahaan BUMN selama ini.

Menurut pasal 44 (1) Permen BUMN 01/2011, BUMN wajib melakukan pengukuran atas kualitas penerapan GCG yang dilaksanakan berkala setiap 2 tahun dalam bentuk 2 penilaian (*assesment*) atas pelaksanaan GCG dan evaluasi *review* atas tindak lanjut rekomendasi perbaikan dari hasil penilaian sebelumnya. Pada prinsipnya yang melakukan evaluasi adalah BUMN itu sendiri (penilaian mandiri), sedangkan pelaksanaan penilaian dilakukan oleh penilai independen yang kompeten dan harus ditunjuk oleh dewan komisaris.

Riset *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* (2002) menemukan bahwa alasan utama perusahaan menerapkan *corporate governance* adalah kepatuhan terhadap peraturan. Perusahaan meyakini bahwa implementasi *corporate governance* merupakan bentuk lain penegakan etika bisnis dan etika kerja yang sudah lama menjadi komitmen perusahaan, dan implementasi *corporate governance* berhubungan dengan peningkatan citra perusahaan. Perusahaan yang mempraktikkan *corporate governance*, akan mengalami perbaikan citra, dan peningkatan nilai perusahaan.

Perusahaan-perusahaan di Indonesia belum mampu melaksanakan *corporat governance* dengan sungguh-sungguh sehingga perusahaan belum bisa mewujudkan *good governance* dengan baik. Hal ini karena disebabkan karena adanya kendala yang dihadapi perusahaan tersebut pada saat melaksanakan *corporate governance* demi terwujudnya prinsip GCG dengan baik.

Mendapatkan keuntungan merupakan tujuan utama dari setiap perusahaan termasuk PT. Pelabuhan Indonesia, dan hal tersebut tidak akan lepas dari

masalah-masalah yang akan datang dan menghalangi perusahaan dalam mencapai tujuan mereka. Salah satu masalah yang mungkin akan dialami perusahaan adalah buruknya pengelolaan didalam perusahaan dan tidak berfungsinya sistem perencanaan dan pengendalian internal yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian.

PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak pada penyedia layanan jasa kepelabuhan di Indonesia. PT. Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) Medan didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1991 dengan Akte Notaris Imas Fatimah SH No. 1 tanggal 1 Desember 1992 sebagaimana dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI dalam Tambahan Berita Negara RI 2 Januari 1999 No. 1.

Tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keandalan alat produksi untuk mendukung peran pelabuhan sebagai pusat logistik melalui aktivitas yang memberikan nilai tambah sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Skor GCG dan kinerja keuangan PT. Pelabuhan Indonesia I (persero) Medan dapat dilihat ditabel berikut :

Tabel 1.1
Skor GCG dan Kinerja Keuangan
PT. Pelindo I (Persero)

Keterangan	2012	2013	2014	2015	2016	Standar BUMN
Good Corporate Governance						
Skor GCG	90,37%	93,31%	94,16%	94,19%	94,23%	100%
Kinerja Keuangan						
Current ratio	207%	208%	203%	159%	164%	>125%
ROI	8,46%	10,68%	12,08%	12,75%	10,04%	>18%
ROE	15,52%	17,53%	18,44%	19,24%	17,04%	>15%
PP	2,09 hari	2,30 hari	3,01 hari	3,30 hari	3,05 hari	<60 Hari
TMS	54,53%	60,93%	65,52%	66,28%	58,91%	30% s/d 40%
TATO	37,20%	41,35%	43,15%	42,62%	32,99%	>120%

Sumber : laporan keuangan PT. Pelabuhan Indonesia I (persero) Medan tahun.

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) PT. Pelindo I (Persero) setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan ini sangat baik. Namun, tidak diikuti dengan kinerja keuangan yang baik, seperti *Return On Investment (ROI)*, *Return On Equity (ROE)*, *Inventory Turn Over (PP)*, *Total Aset Turn Over (TATO)*, dan *Total Modal Sendiri (TMS)*, yang rasionya mengalami penurunan pada tahun 2016, tetapi khususnya untuk TATO dan ROI skornya belum sesuai dengan ketentuan skor BUMN No: KEP-100/MBU/2002 yang telah ditentukan standarnya, sedangkan *current ratio*, mengalami fluktuasi setiap tahun.

Menurut Dani & Hasan (2005) menyatakan bahwa : faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan anatara lain *good corporate governance* karena dasar *good corporate governance* pada dasarnya memiliki tujuan memberikan kemajuan terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan. Semakin baik *good*

corporate governance yang dimiliki perusahaan maka diharapkan semakin baik pula kinerja dari suatu perusahaan tersebut. sedangkan yang terjadi *good corporate governance* belum mampu meningkatkan kinerja keuangan PT. Pelabuhan Indonesia I (persero) Medan.

Ujiyanto, (2007) *corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, pra pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

Kieso dan Weygandt, (2008) Ukuran yang dicapai dalam menilai kinerja perusahaan sangatlah bermacam-macam dan berbeda-beda dari satu industri ke industri lainnya tergantung pada aktivitas pokok perusahaan seperti produksi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan banyak lagi kegiatan lainnya. Kinerja keuangan adalah salah satu tolak ukur dalam menilai suatu perusahaan, kondisi keuangan yang bagus cenderung menarik perhatian investor, Dalam hubungannya dengan kinerja, laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja perusahaan.

Titi Purwantini (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan dengan indikator independensi dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan kepemilikan terkonsentrasi.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009), Laporan Keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya membahas mengenai pengaruh *Good Governance Corporate* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Peneliti Gabriela (2013) menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan antara variabel independen *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA, Tobin's Q, sedangkan jika diukur dengan ROE memiliki pengaruh yang signifikan.

Begitu, juga yang dikatakan oleh Peneliti Dian Prasinta (2012) menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan positif antara *Good Governance Corporate* dengan *Return On Aset*, namun terdapat hubungan positif antara *Good Governance Corporate* dengan *Return On Equity*, dan tidak terdapat hubungan positif antara *Good Corporate Governance* dengan Tobin's Q. Sedangkan dari peneliti Like Monisa Wati (2012) menunjukkan bahwa praktek *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan (*Return On Equity dan Net Profit Margin*) pada perusahaan yang terdaftar di BEI yang masuk daftar peringkat oleh *The Indonesia Institute For Corporate Governance*.

Berdasarkan uraian diatas sangat penting pengukuran terhadap kinerja keuangan yang dilakukan dengan perhitungan terhadap rasio likuidita, rasio profitabilitas, rasio aktivitas dan rasio solvabilitas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengambil judul **“Analisis *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan dapat diidentifikasi masalah mengenai Analisis *Good Corporate Governance* Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan yaitu :

1. Skor GCG yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, sedangkan kinerja keuangan yang diukur menggunakan rasio keuangan menurun pada tahun 2016 dilihat dari *ROI*, *ROE*, *PP*, *TATO*, dan *TMS*.
2. Untuk *Return On Investment (ROI)* dan *Total Asset Turn Over (TATO)*, kinerja keuangan yang diukur tidak sampai pada skor ketetapan standar BUMN No. 100/MBU/2002.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa GCG mengalami kenaikan setiap tahunnya, sedangkan Kinerja Keuangan yang diukur dengan Rasio Keuangan mengalami penurunan?.
2. Bagaimana GCG dalam meningkatkan Kinerja Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan pada tahun 2012-2016 ?.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa GCG yang mengalami peningkatan sedangkan kinerja keuangan yang diukur dengan rasio keuangan mengalami penurunan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis GCG dalam meningkatkan kinerja keuangan yang diukur dengan rasio keuangan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan untuk tahun 2012-2016.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat menambah wawasan penulis tentang penerapan *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

2. Manfaat Bagi Perusahaan

Membantu memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan, dalam hal ini penerapan *Good Corporate Governance*, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan dimasa mendatang.

3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pihak yang membutuhkan dan berminat mengembangkannya dalam taraf yang lebih lanjut dengan penelitian yang sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Good Corporate Governance*

Menurut Cadbury seperti yang dikutip oleh Adrian Sutedi (2011) *Good Corporate Governance* adalah “mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai kesinambungan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan”. Istilah tata kelola perusahaan di Indonesia merupakan terjemahan dari *Corporate Governance*. Subroto, 2005 Kata *governance* berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu *gouvernance* yang berarti pengendalian (*control*) atau *Regulated* dan dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang berada dalam kondisi yang terkendali.

Corporate governance telah memainkan peran penting bagi *private sector* di seluruh dunia dan terintegrasinya pasar keuangan yang mendorong terciptanya kompetisi dan risiko dari mobilitas aliran modal (Herdinata, 2008).

Definisi GCG menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 adalah suatu proses atau struktur yang digunakan BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka waktu yang panjang dan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Sehubungan dengan tidak berlakunya Keputusan Menteri Negara BUMN tersebut yang selama ini digunakan sebagai dasar penerapan *Good Corporate Governance*, yaitu Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP-117/M-

MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktik GCG pada Badan Usaha Milik Negara karena digantikan dengan peraturan menteri negara Badan Usaha Milik Negara Nomor:PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelolah Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (tanggal 1 Agustus 2011), maka defenisi *Good Corporate Governance* berubah menjadi prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

merupakan masalah yang tidak akan berakhir dan terus menjadi bahan pembahasan bagi pelaku bisnis, akademis, pembuat kebijakan, dan lain sebagainya. Perhatian terhadap GCG kian meningkat seiring banyak bermunculan masalah skandal keuangan dilingkungan bisnis. Konsep GCG telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli dan badan sebagai alat kontrol dan pengawasan terhadap kinerja perusahaan.

Wardhani (2006), menyatakan Bahwa *corporate governance* merupakan tata kelolah perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan. Isu mengenai *corporate governance* telah mengemuka, khususnya diIndonesia setelah Indonesia mengalami masa kritis yang berkepanjangan sejak tahun 1998. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan diIndonesia ini disebabkan oleh sangat lemahnya *corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan diperhatikan yang cukup signifikan dalam praktek *corporate governance*. *Corporate governance* biasanya mengacu pada sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh

manajer ketika ada pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian. Beberapa pengendalian ini terletak pada fungsi dari Dewan Direksi, Pemegang Saham Institusional, dan Pengendalian Dari Mekanisme Pasar.

2. Teori *Good Corporate Governance*

1. *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Teori keagenan dapat dipandang sebagai suatu versi dari *game theory*, yang membuat suatu model kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut *agent* dan pihak yang lain disebut *principal*. *Principal* mendelegasikan pertanggungjawaban atas *decision making* kepada *agent*, hal ini dapat pula dikatakan bahwa *principal* memberikan suatu amanah kepada *agent* untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati.

Wewenang dan tanggungjawab *agent* maupun *principal* diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. Cara untuk mengatasi masalah ketidakselarasan kepentingan adalah melalui pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Tiga bentuk hubungan keagenan, yaitu antara pemilik dengan manajemen (*bonus plan hypothesis*), kreditur dengan manajemen (*debt/equity hypothesis*), dan pemerintah dengan manajemen (*political cost hypothesis*).

Perspektif teori agensi merupakan dasar yang digunakan untuk memahami isu *Corporate Governanace* dan manajemen laba. Adanya pemisahan kepemilikan oleh *principal* dengan pengendalian oleh agen dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenen diantara *principal* dan

agen. Dengan laporan keuangan yang dilaporkan oleh agen sebagai pertanggung jawaban kinerjanya, *principal* dapat menilai, mengukur dan mengawasi sampai sejauh mana agen tersebut bekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya serta sebagai dasar pemberian kompensasi kepada agen. (Berkaoui, 2007).

Corporate Governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang mereka investasikan. Darmawati (2005), *Corporate Governance* berkaitan dengan bagaimana investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi investor, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-royek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana atau kapital yang telah ditanamkan oleh investor dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengendalikan para manajer.

2. Theory Stakeholders

Menurut Hummels (1998) dalam Hadi (2011), adalah individu dan kelompok yang memiliki klaim sah terhadap organisasi untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan hanya karena mereka dipengaruhi oleh praktik, kebijakan, dan tindakan organisasi tersebut.

Pengertian *Stakeholders* atau para pemangku kepentingan menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor:PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (BUMN) karena mempunyai hubungan hukum dengan perusahaan (BUMN). Perusahaan tidak hanya memandang

bahwa *stakeholders* adalah investor dan kreditor saja, melainkan antara lain pemerintah, pelanggan, pemasok, karyawan (tenaga kerja), masyarakat dan lingkungan.

Sarwako, (2003) “Pemerintah dapat dikatakan sebagai *stakeholders* bagi perusahaan dan keberadaan perusahaan sebagai salah satu elemen sistem social dalam sebuah negara”. Oleh karena itu, perusahaan tidak bisa mengabaikan peran pemerintah dalam menjalankan pengelolaan bisnis.

Pihak yang paling penting dalam menjalankan pengelolaan perusahaan adalah masyarakat dan lingkungan, dimana perusahaan dituntut dapat memberi pekerjaan yang produktif dan sehat dalam masyarakat dan tanggung jawab social perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Dalam teori ini menunjukkan adanya peran penting *stakeholders* dalam perusahaan. Untuk itu perusahaan harus mampu memberikan kepuasan terhadap *stakeholders*, dimana perusahaan dituntut untuk dapat memenuhi semua tuntutan *stakeholders* agar dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan.

3. *Stewardship Theory*

Stewardship theory dibangun diatas asumsi filosofi mengenai sifat manusia yakni manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam tuntutan yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan public pada umumnya maupun *shareholders* pada khususnya.

3. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip *Good Corporate Governance* diharapkan menjadi titik rujukan pembuat kebijakan (pemerintah) dalam membangun kerangka kerja penerapan *Corporate Governance*. Bagi pelaku usaha dan pasar modal, prinsip ini dapat menjadi pedoman mengolaborasi praktek terbaik bagi peningkatan kinerja dan keberlangsungan perusahaan. Menurut SK Menteri BUMN Nomor : Kep. 117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* yang dikutip oleh Sedarmayanti diutarakan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* meliputi :

1. *Fairnes* (Kewajaran)

Dalam melaksanakan kegiatanny, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran. Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam. Prinsip ini diwujudkan antara lain:

- a. Dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas.
- b. Membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam dan konflik kepentingan.

c. Menetapkan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

2. *Transparacy* (Transparan)

Transparancy (Transparansi) Hak pemegang saham, yang harus diberi informasi benar dan tepat waktu mengenai perusahaan, dapat berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan mendasar atas perusahaan dan memperoleh bagian keuntungan perusahaan. Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi mengenai semua hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan. Prinsip ini diwujudkan antara lain :

- a. Mengembangkan sistem informasi akuntansi yang berbasiskan standar akuntansi.
- b. Mengembangkan informasi teknologi dan management information system untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi.
- c. Mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka.

Adapun hal-hal yang harus diungkapkan adalah :

a. *Financial and Operating Result*

Laporan keuangan yang sudah di audit adalah sumber informasi untuk memonitor kinerja keuangan perusahaan untuk meletakkan dasar bagi penilaian asset sekuritas. Diskusi manajemen dan analisis operasi terkadang juga menyertai laporan keuangan, pengungkapan hal-hal diatasakan bermanfaat bagi investor.

b. Tujuan Perusahaan

Tujuan perusahaan harus disosialisasikan kepada lingkungan bisnis dan masyarakat umum. Informasi ini mungkin penting bagi investor dan pengguna lainnya untuk mengevaluasi hubungan perusahaan dengan komunitas tempat mereka beroperasi dan langkah-langkah perusahaan yang akan diambil perusahaan untuk mencapai tujuannya.

c. Kepemilikan Saham

Salah satu hak investor adalah mendapatkan informasi tentang struktur kepemilikan perusahaan hingga hak-hak pemilik perusahaan. Pengungkapan yang diperlukan adalah data pemegang saham mayoritas, hak-hak voting khusus, persetujuan pemegang saham dan lain-lain.

d. Isu-isu material yang berhubungan dengan kepegawaian dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Setiap informasi yang diungkapkan harus di audit terlebih dahulu agar mempunyai standar kualitas yang tinggi, audit harus dilaksanakan oleh auditor independen untuk memberikan informasi yang independent bagi pihak eksternal. Jalur informasi harus mencerminkan keadilan, ketepatan waktu, dan efisiensi biaya agar informasi relevan.

3. *Accountability* (Akuntabilitas)

Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan antar manajer, pemegang saham, dewan komisaris, dan auditor, merupakan bentuk pertanggung jawaban

manajemen kepada perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini diwujudkan antara lain :

- a. Menyiapkan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat.
- b. Mengembangkan Komite Audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris.
- c. Mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal.

Terdapat beberapa karakteristik akuntabilitas, sebagai berikut :

- a. Anggota Dewan Direksi dan Komisaris harus bertindak didasari informasi yang lengkap, dengan itikad baik sebesar-besarnya untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham.
- b. Bila keputusan Dewan Direksi dan Komisaris mempunyai pengaruh yang berbeda-beda diantara pemegang saham, maka Dewan harus memuaskan keluhan pemegang saham.
- c. Dewan Direksi dan Komisaris harus menjamin ketaatan atas hukum yang diterapkan dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham.
- d. Dewan Direksi dan Komisaris harus memenuhi beberapa fungsi, yaitu:
 1. Melakukan review atas strategi perusahaan, pelaksanaan rencana utama, kebijakan resiko, anggaran tahunan dan rencana bisnis, pemantauan kinerja perusahaan dan mengawasi harta utama, pembelanjaan dan akuisisi.
 2. Menyeleksi, memberikan penghargaan, memantau hingga bila dibutuhkan mengawasi *succession planning*.
 3. Melakukan review atas gaji eksekutif dan memastikan pencalonan atas anggota Dewan terbuka.

4. Memantau dan mengelola konflik kepentingan dari manajemen, pemegang saham termasuk penyalahgunaan harta, penyalahgunaan hubungan transaksi dari berbagai pihak.

5. Memastikan integritas dari sistem pelaporan akuntansi dan financial perusahaan, melalui audit yang independen, dan sistem pengendalian yang tepat.

6. Mengawasi proses transparansi dan transaksi.

4. *Responsibilitas (responsibility).*

Responsibilitas diartikan sebagai tanggungjawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku serta pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Responsibilitas menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai GCG yaitu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan pihak-pihak lainnya.

5. *Independensi (indenpendency)*

Independency atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independensi penting sekali dalam proses pengambilan keputusan.

Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut.

Effendi, (2009) Berdasarkan uraian di atas, prinsip-prinsip GCG pada hakikatnya yaitu mempertanggung jawabkan kegiatan yang telah dipercayakan, transparansi atas informasi dan keadaan yang sesungguhnya yang diamati perusahaan, persamaan perlakuan bagi seluruh pemegang saham dan *stakeholders*, serta tanggung jawab legal manajemen.

4. Tujuan *Good Corporate Governance*

Corporate Governance yang baik diakui membantu mengebalkan perusahaan dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. Dalam banyak hal GCG yang baik telah terbukti juga meningkatkan kinerja korporat. Dalam keputusan BUMN Nomor Kep:117/M-MBU/2002 diutarakan bahwa penerapan GCG pada BUMN bertujuan untuk :

- a. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
- b. Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ.
- c. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan

adanya tanggung jawab *social* BUMN terhadap *stakeholder* maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.

d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.

e. Meningkatkan investasi nasional.

Effendi, (2009). *Corporate Governance* yang baik merupakan langkah yang penting dalam membangun kepercayaan pasar (*market confidence*) dan mendorong arus investasi internasional yang stabil dan bersifat jangka panjang. Jadi berdasarkan beberapa manfaat di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat GCG antara lain adalah entitas bisnis akan menjadi lebih efisien, meningkatkan kepercayaan publik, dapat mengukur target kinerja perusahaan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan harga saham, meningkatkan *corporate image*.

5. Faktor-faktor Keberhasilan Penerapan GCG

Menurut KNG (2009), keberhasilan pelaksanaan GCG pada perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Komitmen dari organ perusahaan yang dilandasi oleh itikad baik untuk menerapkan GCG secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan.
2. Penciptaan sistem pelaksanaan GCG disemua lapisan melakukan deseminasi dan sosialisasi secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan mengikutseratakan semua pihak yang ada dalam perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Penyesuaian peraturan dan kebijakan perusahaan dengan sistem pelaksanaan GCG.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seluruh jajaran perusahaan yang mengacu pada pedoman perilaku (*Code of Conduct*).

5. Dukungan dari pihak *Stakeholders*.
6. Evaluasi pelaksanaan GCG yang dilakukan berkala oleh perusahaan sendiri maupun yang mengacu dengan pihak yang kompeten dan independen.

6. Pengukuran Terhadap Pelaksanaan GCG

Dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, mewajibkan BUMN melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG. Pengukuran tersebut dapat dilakukan dengan :

a. Penilaian (*assesment*)

Penilaian (*assesment*) adalah program untuk mengidentifikasi implementasi GCG pada BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 tahun. Sebelum melakukan penilaian didahului dengan mensosialisasikan GCG pada semua lapisan BUMN. Penilaian dilakukan oleh penilai (*assessor*) independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris melalui proses dan ketentuan yang berlaku.

Penilaian juga dapat dilakukan dengan menggunakan jasa Instansi Pemerintahan yang berkompeten dibidang GCG, yang ditunjuk.

Secara singkat, ada lima aspek yang dinilai dalam kerangka penilaian GCG :

1. Hak pemegang saham (bobot 20%).

Dalam hak-hak pemegang saham, antara lain kita dapat memberikan evaluasi, apakah perusahaan telah:

- menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam kurun waktu 6 bulan setelah akhir tahun buku, sesuai dengan pasal 65 ayat 2 UU Perusahaan Terbatas;
- menyerahkan kepada pemegang saham pemberitahuan mengenai Rapat Tahunan Pemegang Saham sekurang-kurangnya 28 hari sebelum RUPS diselenggarakan;
- mendorong para pemegang saham untuk menghadiri RUPS dan memanfaatkan hak suara mereka;
- memberikan kesempatan yang cukup kepada para pemegang saham untuk menyampaikan pertanyaan di RUPS; dll.

2. Kebijakan GCG (bobot 15%).

Dalam kebijakan GCG antara lain kita dapat menilai sendiri apakah perusahaan telah:

- a. memiliki aturan tertulis tentang GCG di mana dijelaskan hak-hak pemegang saham, tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. menyediakan akses bagi publik untuk mengetahui kebijakan perusahaan mengenai investor publik;
- c. membentuk sebuah organ yang bertanggung jawab (misalnya Dewan Komisaris) untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi aturan GCG yang telah ditetapkan;
- d. memiliki aturan perilaku / etika bagi karyawan secara tertulis;
- e. menginformasikan dan melaksanakan dengan baik aturan perilaku / etika tersebut; dll.

3. Praktik GCG (bobot 30%).

Dalam praktik GCG ini antara lain kita dapat menguji apakah di dalam perusahaan:

- a. Dewan Direksi mengadakan rapat berkala secara teratur dengan Dewan Komisaris;
- b. ada rencana strategis dan rencana operasional yang memberi petunjuk kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka;
- c. Dewan Direksi dan Dewan Komisaris telah diberikan pelatihan atau mempunyai latar belakang yang tepat, yang memungkinkan mereka untuk melakukan tugas-tugas mereka;
- d. anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi tidak terlibat konflik kepentingan;
- e. ada sistem penilaian kinerja Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris;
- dll.

4. Pengungkapan (bobot 20%).

Dalam seksi ini kita dapat menilai apakah perusahaan telah:

- a. menyediakan akses yang sama bagi pemegang saham dan analis keuangan;
- b. memberikan penjelasan yang tepat tentang risiko usaha;
- c. mengungkapkan remunerasi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dengan benar;
- d. mengungkap transaksi pihak terkait;

- e. menyajikan hasil kinerja keuangan dan manajemen analisis melalui internet; dll.

5. Audit (bobot 15%) .

Pada bagian ini kita dapat menilai apakah perusahaan telah:

- a. memiliki audit internal yang efektif,
 - b. diaudit oleh akuntan publik yang independen,
 - c. memiliki komite audit yang efektif,
 - d. mengembangkan komunikasi yang efektif antara audit internal, audit eksternal dan komite audit, dll.
- b. Evaluasi (*review*)

Evaluasi (*review*) adalah program untuk menggambarkan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian, yang mencakup evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas perbaikan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh BUMN itu sendiri (*self assesment*). Dalam pelaksanaan evaluasi dapat dibantu oleh penilaian independen atau Jasa Instansi Pemerintah tidak dapat menjadi penilai tahun berikutnya. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator yang ditetapkan Sekretaris Kementerian BUMN. Hasil evaluasi dilaporkan kepada RUPS/Menteri bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.

7. Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Duha (2016) kinerja merupakan cara atau kemampuan individu dalam bekerja untuk dapat memberikan hasil yang memuaskan di tempatnya

bekerja dalam satu paket atau bagian pekerjaan tertentu atau pada suatu periode waktu tertentu.

Menurut Dwiermayanti (2009)

“Kinerja keuangan perusahaan adalah suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu”. Dengan kata kinerja keuangan perusahaan disebut juga suatu penentuan yang mengukur mengenai baik buruknya perusahaan dalam prestasi kerja dapat dilihat dari kondisi keuangannya pada periode tertentu.

Ada beberapa pengertian analisis rasio ditemukan oleh beberapa ahli menurut Bambang Riyanto (2009) yang dikemukakan analisis rasio yaitu sebagai berikut “Pengertian rasio disini sebenarnya hanyalah alat yang dinyatakan dalam *aritmatika term* yang dapat digunakan untuk hubungan antara dua macam data *financial*”

Jenis Analisis Rasio Keuangan

1. Rasio Likuiditas

Menurut Munawir (2007) menyatakan likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus seegera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saat ditagih.

Hanif dan Darsono (2009) menyatakan rasio likuiditas adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. Kemampuan itu dapat diwujudkan bila jumlah harta lebih besar dari pada hutang lancar. Perusahaan yang likuid adalah perusahaan yang mampu memenuhi semua kewajiban yang jatuh tempo dan perusahaan yang tidak likuid adalah

perusahaan yang tidak mampu memenuhi semua kewajibannya yang jatuh tempo.

Jenis jenis rasio likuiditas adalah sebagai berikut

1. *Cash Ratio*

Menurut Sutrisno (2008) cash ratio merupakan rasio yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas adalah efek atau surat berharga. Rasio ini adalah rasio yang paling likuid. Semakin besar cash ratio, maka semakin tinggi pula kemampuan likuiditas perusahaan yang bersangkutan namun dalam praktiknya akan mempengaruhi profitabilitasnya.

2. *Current Ration*

Menurut Sutrisno (2008) current ratio merupakan rasio yang membandingkan antara aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dengan hutang jangka pendek. Aktiva lancar meliputi kas, piutang dagang, efek, persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Sedangkan hutang jangka pendek meliputi hutang dagang, hutang wesel, hutang bank, hutang gaji, dan hutang lainnya yang segera harus dibayar.

3. Rasio Cepat (*Quick Rasio*)

Rasio cepat merupakan alat ukur untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih likuid.

2. Rasio Profitabilitas

Hanif dan Darsono (2009) profitabilitas adalah kemampuan manajemen untuk memperoleh laba. Laba terdiri dari laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Untuk memperoleh laba diatas rata-rata, manajemen harus mampu meningkatkan pendapatan dan mengurangi semua beban atas pendapatan.

Rasio ini merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan.

1. *Return On Investmen (ROI)*

Menurut Syamsuddin (2011) *Return On Invesment* merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aktiva. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik keadaan suatu perusahaan.

2. *Return On Equity (ROE)*

Menurut Syamsuddin (2011) rasio ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengembalian yang diberikan perusahaan kepada para pemilik saham. Semakin tinggi tingkat rasio, maka semakin besar tingkat pengembalian yang diberikan perusahaan kepada para pemilik saham, dimana hal ini berdampak pada peningkatan harga saham.

3. *Gross Profit Margin*

(Margin Laba Kotor) *Gross profit margin* merupakan rasio yang mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya, mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk memproduksi secara efisien (Sawir, 2009). *Gross profit margin* merupakan persentase laba kotor dibandingkan dengan sales. Semakin besar gross profit margin semakin baik keadaan operasi perusahaan, karena hal ini menunjukkan

bahwa harga pokok penjualan relatif lebih rendah dibandingkan dengan sales, demikian pula sebaliknya, semakin rendah gross profit margin semakin kurang baik operasi perusahaan (Syamsuddin, 2009:61).

4. *Net Profit Margin*

(Margin Laba Bersih) Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi *Net profit margin* semakin baik operasi suatu perusahaan.

5. *Earning Per Share (EPS)*

Earning per share adalah rasio yang menunjukkan berapa besar kemampuan perlembar saham dalam menghasilkan laba (Syafri, 2008:306). *Earning per share* merupakan rasio yang menggambarkan jumlah rupiah yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa (Syamsuddin, 2009). Oleh karena itu pada umumnya manajemen perusahaan, pemegang saham biasa dan calon pemegang saham sangat tertarik akan *earning per share*. *Earning per share* adalah suatu indikator keberhasilan perusahaan.

3. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas ini disebut juga Ratio leverage yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan dana yang dipinjam dari kreditur perusahaan tersebut. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang rasio ini menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman (Bank).

1. Total Modal Sendiri

Menurut Rangkuti (2011) total modal sendiri merupakan seluruh komponen modal sendiri pada akhir tahun buku diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya dibagi total aset yang dikurangi dengan dana yang belum ditetapkan statusnya pada posisi akhir tahun buku yang bersangkutan. Semakin tinggi tingkat rasio, maka semakin kecil jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan.

2. *Total Debt to Total Asset Ratio*

(Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang lancar dan hutang jangka panjang dan jumlah seluruh aktiva diketahui. Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang.

4. Rasio Aktivitas

Hanif dan Darsono (2009) analisis aktivitas atau perputaran adalah kemampuan manajemen mengoptimalkan harta untuk memperoleh pendapatan.harta kecil yang mampu menghasilkan pendapatan yang besar, menandakan manajemen profesional.

Rasio ini melihat pada beberapa aset kemudian menentukan berapa tingkat aktivitas aktiva-aktiva tersebut pada tingkat kegitation tertentu. Aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aktiva-aktiva tersebut. Dana kelebihan tersebut akan lebih baik bila ditanamkan pada aktiva lain yang lebih produktif.

1. Perputaran Persediaan (*Inventory Turn Over*)

Hanafi dan Halim, (2008) Seperti halnya perputaran piutang, rasio ini juga menggambarkan likuiditas perusahaan, yaitu dengan cara mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola dan menjual persediaan yang dimiliki perusahaan. Perputaran persediaan yang tinggi menandakan semakin tingginya persediaan berputar dalam satu tahun. Hal ini menandakan efektivitas manajemen persediaan. Sebaliknya, jika perputaran persediaan rendah menunjukkan pengendalian atas persediaan rendah menunjukkan pengendalian atas persediaan kurang efektif.

2. *Total Asset Turn Over (TATO)*

Menurut Rangkuti (2011) *total assets turn over* merupakan ukuran efektifitas pemanfaatan total aktiva dalam menghasilkan penjualan. Semakin besar perputaran total aktiva atau semakin cepat berputar, maka semakin efektif perusahaan dalam mengelola total aktiva untuk menghasilkan penjualan.

3. *Perputaran Piutang (Receivable Turn Over)*

Prastowo dan Julianty, (2003) Rasio ini mengukur berapa kali, secara rata-rata piutang yang dikumpulkan dalam satu tahun. Rasio ini mengukur kualitas piutang dan efisiensi perusahaan dalam pengumpulan piutang dan kebijakan kreditnya. Rasio ini biasanya digunakan dalam hubungan dengan analisis terhadap modal kerja, karena memberi ukuran seberapa cepat piutang perusahaan berputar menjadi kas. Angka jumlah hari piutang, menggambarkan lamanya suatu piutang bisa ditagih (jangka waktu pelunasan). Semakin lama jangka waktu

pelunasannya, semakin besar pula resiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang .

4. Perputaran Aktiva Tetap

Hanafi dan Halim, (2000) Rasio mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Rasio ini memperlihatkan sejauh mana efektifitas perusahaan menggunakan aktiva tetapnya. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efektif proporsi aktiva tetap tersebut. Pada beberapa industri seperti industri yang mempunyai proporsi aktiva tetap yang tinggi, rasio ini cukup penting diperhatikan. Sedangkan pada beberapa industri yang lain seperti industri jasa yang mempunyai proporsi aktiva tetap yang kecil, rasio ini barangkali tidak begitu penting untuk diperhatikan.

8. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang meneliti tentang analisis *good corporate governance* dalam meningkatkan kinerja menunjuk pada beberapa penelitian terdahulu, berikut tabel ringkasan penelitian terdahulu.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Danang Febriyanto (2013)	Analisis penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris	<i>Good Corporate Governance</i> , kinerja	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) variabel dewan komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja

	Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2012		perusahaan, (2) variabel dewan direksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan, (3) variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan, (4) variabel kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan
Andrea Widianti Maris (2012)	Implementasi GCG dan Kinerja <i>Growth</i> dan <i>Leverage</i> sebagai Variabel Intervening	variabel I <i>Good Coperate Governance</i> dan Kinerja <i>Growth</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi GCG berpengaruh langsung pada kinerja perusahaan yang diukur oleh EVA. Namun dengan intervening <i>Growth</i> dan <i>leverage</i> , implementasi GCG tidak berpengaruh pada kinerja perusahaan. Implementasi GCG tidak berpengaruh pada <i>growth</i> dan <i>growth</i> tidak berpengaruh pada kinerja perusahaan. Meskipun implementasi GCG berpengaruh pada <i>leverage</i> perusahaan, tetapi <i>leverage</i> tidak

			berpengaruh pada kinerja perusahaan. Dengan kata lain, growth dan leverage bukan merupakan intervening yang baik dalam pengaruh GCG pada kinerja perusahaan
Anton (2012)	Analisis <i>good corporate governance</i> terhadap kinerja perusahaan	Variabel independen : <i>Good Corporate Governance</i> Variabel Dependen: kinerja	Hasi analisis dan pembahasan penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh langsung yang positif signifikan dari penerapan <i>good corporate</i> terhadap EVA Momentum sebagai alat ukur kinerja perusahaan, dan juga menunjukkan bahwa penerapan GCG secara langsung dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan. Sebagai investor, imbal hasil investasi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan salah satu tujuan investasi
Inggrid Puspa (2014)	Analisa Corporate Governance dalam meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan BUMN Sektor Perbankan	<i>Good Corporate Governance</i> , Kinerja Keuangan	<i>Corporate Governance</i> belum optimal dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

	yang Terdaftar di BEI		
Fanji Ahmad (2015)	Analisi <i>good corporate governance</i> dalam meningkatkan kinerja perusahaan PT Perkebunan Nusantara III tahun 2010-2014	<i>good corporate governance</i> , kinerja keuangan diukur ROI, ROE, TATO, dan TMS	Kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan rasio dan penerapan <i>good corporate governance</i> untuk penilaian kinerja PT. Perkebunan Nusantara III belum tentu dapat memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan secara keseluruhan.
Anna (2014)	Analisi <i>good corporate governance</i> dalam meningkatkan kinerja keuangan perbankan yang terdaftar dibursa efek indonesia	<i>Good corporate governance</i> , <i>Kinerja keuangan</i> .	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan adalah arah yang positif untuk capital adequacy ratio (CAR), profit before tax to tier 1 capital (PTC), total assets (TA), non-performing loans (NPL) dan return on average assets (ROAA

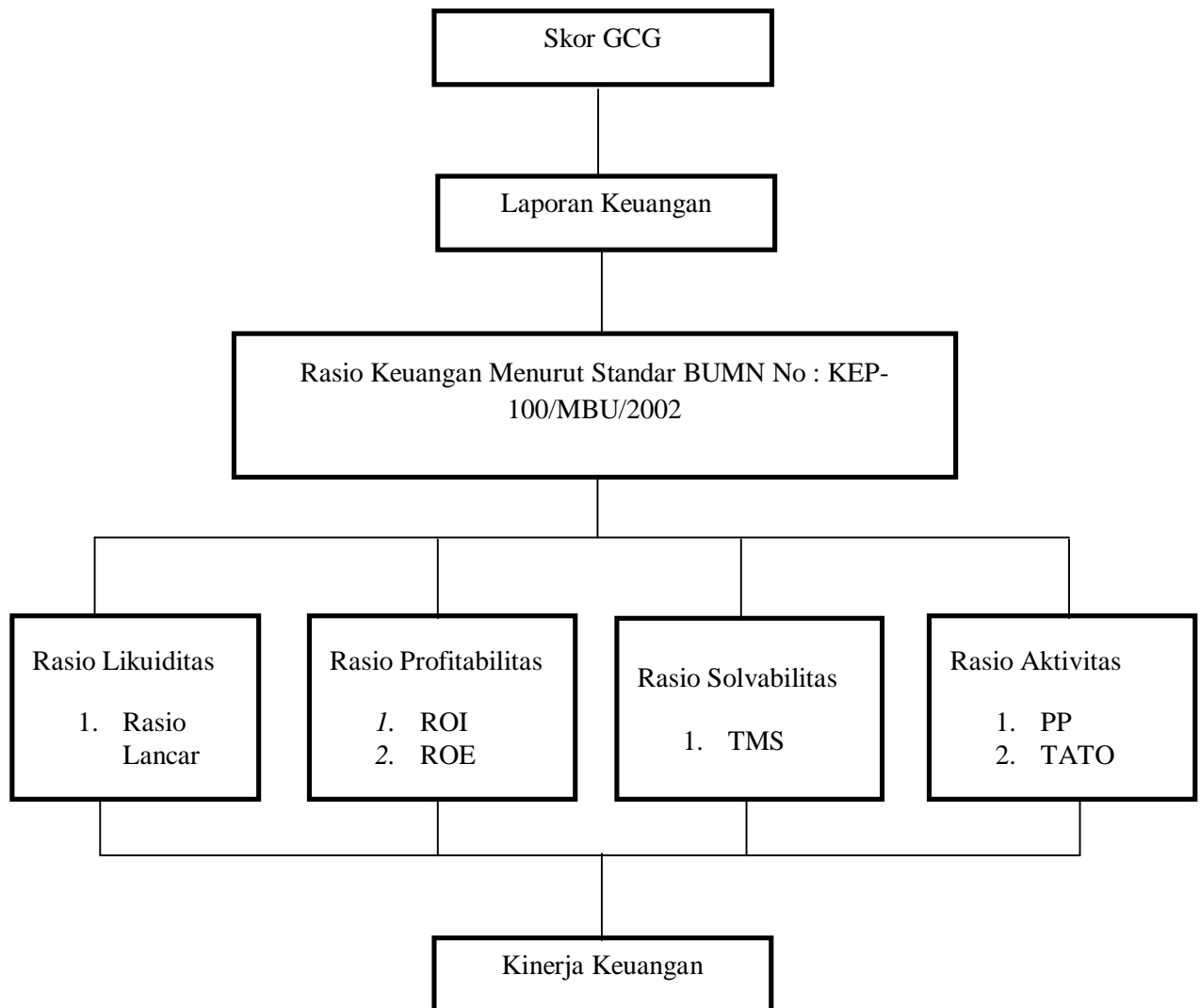
B. Kerangka Berpikir

Good Corporate Governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya.

Good Corporate Governance dapat mengurangi risiko yang mungkin akan dilakukan oleh dewan direksi dan komisaris dengan berbagai keputusan yang mementingkan kepentingan pribadi. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada sebuah perusahaan. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu banyak yang menghubungkan *Corporate Governance* dengan Kinerja Keuangan.

Kinerja Keuangan merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu kualitas perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dan diukur dengan menganalisis suatu laporan keuangan perusahaan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, banyak yang menghubungkan *Corporate Governance* dengan Kinerja Keuangan, seperti pada penelitian Danang (2013) dan Ni Luh Putu (2012) yang menyatakan terdapat pengaruh antara GCG dengan Kinerja Keuangan. Dalam penelitian ini GCG diukur berdasarkan kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan skor ketetapan dari Kementrian Badan Usaha Milik Negara NO : KEP-100/MBU/2002 yang dapat dilihat gambar dibawah ini :



Gambar 2.1 : kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian deskriptif yaitu mengadakan kegiatan pengumpulan data dan analisa data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang *Good Corporate Governance* (GCG) dalam meningkatkan kinerja keuangan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan.

B. Devinisi Operasional Penelitian

Defenisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dapat meningkatkan nilai perusahaan yaitu kinerja keuangannya, mengurangi risiko merugikan akibat tindak pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel independen *good corporate governance* serta variabel dependen Kinerja Keuangan. Adapun definisi dari variabel diatas adalah sebagai berikut :

1. Good Corporate Governance

Corporate governance dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/ pemilik modal, komisaris, dewan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam

jangka panjang dengan tetap memperhatikan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Good Corporate Governance adalah sistem yang mengendalikan dan mengarahkan perusahaan dengan tujuan, agar menciptakan keseimbangan atau kekuatan kewenangan yang diperlukan perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Pengukuran untuk tingkat *Good Corporate Governanc* dilakukan dengan skor persentase *Good Corporate Governance*. Pengukuran untuk tingkat *Good Corporate Covernance* dilakukan dengan skor persentase *Good Corporate Covernance* sesuai dengan Standar BUMN No : KEP-100/MBU/2002.

2. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan perusahaan yang didefinisikan dengan perhitungan yaitu hasil keuangan yang dicapai perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan yang diukur dengan Rasio Profitabilitas, Rasio Likuiditas, dan Rasio Aktivitas. Baik atau tidaknya kondisi perusahaan tergantung pada kinerja keuangan yang ada di perusahaan tersebut. Perusahaan yang baik yaitu dapat membayar kewajiban jangka pendek ataupun jangka panjangnya serta dapat mengelolah persediaan dalam perusahaan tersebut dengan baik. Perusahaan dapat dikatakan berhasil jika sudah mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kinerja keuangan perusahaan dapat mengukur keberhasilan laba, sehingga dapat melihat prospek, pertumbuhan, dan potensi perkembangan perusahaan dengan mengandalkan sumberdaya yang ada. Kinerja keuangan merupakan suatu tingkat keberhasilan yang dicapai suatu perusahaan dalam

mengelola keuangan yang dimiliki perusahaan tersebut sehingga diperoleh hasil pengelolaan yang lain.

Kinerja Keuangan dapat diukur dengan rasio, yaitu sebagai berikut :

1. Return On Equity (ROE)

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

2. Return On Investmen (ROI)

$$\text{ROI} = \frac{\text{EBIT} + \text{Penyusutan}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

3. Current Ratio

$$\text{ROI} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

4. Perputaran Persediaan

$$\text{PP} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total pendapatan Usaha}} \times 365\%$$

5. TATO

$$\text{TATO} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

6. TMS

$$\text{TMS} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan, Jl. Krakata Ujung No.100 Medan-20241. Telp. (061)–6610220, Fax. (061) –6610906.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2017 sampai dengan Maret 2018. Adapun rincian jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3
Waktu Penelitian

No	Jenis Penelitian	Des 2017	Januari 2018	Februari 2018	Maret 2018	April 2018
1.	PraRiset	■				
2.	Pengajuan judul		■			
3.	Penyusunan dan Bimbingan Proposal			■		
4.	Seminar Proposal				■	
5.	Penyusunan Skripsi dan Bimbingan Skripsi				■	
6.	Sidang Meja Hijau					■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu merupakan data yang berbentuk angka-angka, seperti laporan keuangan yaitu Laba Rugi, Neraca, dan Skor GCG pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan berupa data keuangan yaitu Laba Rugi, Neraca, dan Skor GCG mulai dari tahun 2012-2016.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan teknik dokumentasi terhadap sumber penelitian. Studi dokumentasi yaitu dengan memperoleh data Laporan Keuangan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menjelaskan dan menganalisis sehingga memberikan informasi dengan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti. Dan dalam penelitian ini tidak memerlukan hipotesis. Dalam penelitian ini digunakan sebagai alat ukurnya yaitu rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan rasio aktivitas. Serta melakukan analisis penyebab terjadinya penurunan rasio tersebut. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian pada objek penelitian yaitu PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan.
- b. Menganalisis skor GCG PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan..

- c. Menganalisis skor kinerja keuangan yang diukur dengan Rasio ROE, ROI, Rasio Lancar, Peputaran Persediaan, TMS, dan TATO.
- d. Menganalisis penyebab TATO, dan ROI menurun.
- e. Menganalisis GCG dalam meningkatkan Kinerja Keuangan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan diukur berdasarkan perbandingan rasio keuangan selama tahun pengamatan dengan rasio sesuai dengan Standar BUMN No : KEP-100/MBU/2002 yang telah dilakukan.
- f. Menarik Kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Perusahaan

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) pada awalnya masa penjajahan Belanda adalah perusahaan dengan nama "Haven Bedrijf". Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pada periode 1945-1950, Perusahaan berubah status menjadi Jawatan Pelabuhan. Pada 1969, Jawatan Pelabuhan berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan status Perusahaan Negara Pelabuhan disingkat dengan nama PNP.

Periode 1969-1983, PN Pelabuhan berubah menjadi Lembaga Pengusaha Pelabuhan dengan nama Badan Pengusahaan Pelabuhan disingkat BPP. Pada 1983, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1983 Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) dirubah menjadi Perusahaan Umum Pelabuhan I disingkat Perumpel I. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1991 Perumpel I berubah status menjadi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero).

Perubahan nama Perusahaan menjadi PTPelabuhan Indonesia I (Persero) berdasarkan Akta No. 1 tanggal 1 Desember 1992 dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8519.HT.01.01 tahun 1992 tertanggal 1 Juni 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 8612 tanggal 1 Nopember 1994, tambahan No. 87.

Berdasarkan Akta No. 207 tanggal 30 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Risna Rahmi Arifa, S.H., anggaran dasar Perusahaan mengalami

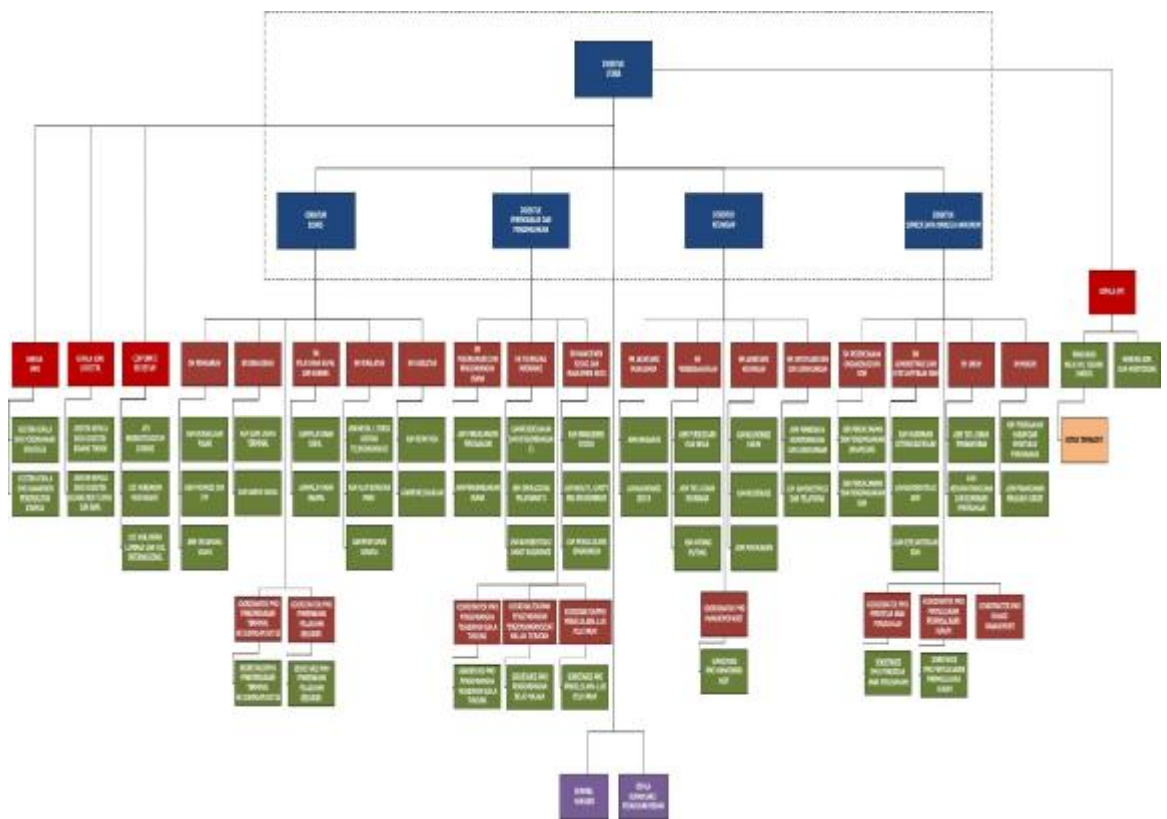
perubahan dengan peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp1.800.000.000.000 (Rp1,8T) yang terbagi atas 1.800.000 saham dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 per saham menjadi Rp6.800.000.000.000 (Rp 6,8 triliun) yang terbagi atas 6.800.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham. Berdasarkan akta tersebut juga telah terjadi peningkatan modal disetor perusahaan dari Rp511.960.000.000 yang terbagi atas 511.960 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham menjadi Rp1.700.000.000.000 yang terbagi atas 1.700.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham. Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU.05403.40.20.2014 tanggal 11 Juli 2014.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Krakatau Ujung No. 100 Medan 20241, Sumatera Utara, Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2001, kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham pada Persero Perusahaan Terbatas dialihkan kepada Menteri BUMN Republik Indonesia, sedangkan pembinaan Teknis Operasional berada ditangan Departemen Perhubungan Republik Indonesia dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Sebelum tahun 2008, Perusahaan bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan, pelayanan peti kemas, terminal dan depo peti kemas, usaha galangan kapal, pelayanan tanah, listrik dan air, pengisian BBM, konsolidasi dan distribusi termasuk hewan, jasa konsultasi kepelabuhanan dan perusahaan kawasan pabean. Sejak tahun 2008, dalam rangka optimalisasi sumber daya maka Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha lain meliputi jasa angkutan, sewa

dan perbaikan fasilitas, perawatan kapal dan peralatan, alih muat kapal, properti diluar kegiatan utama kepelabuhan, kawasan industri, fasilitas pariwisata dan perhotelan, jasa konsultan dan surveyor, komunikasi dan informasi, konstruksi kepelabuhan, ekspedisi, kesehatan, perbekalan, shuttle bus, penyelaman, tally, pas pelabuhan dan timbangan.

2. Struktur Organisasi



Berdasarkan keputusan direksi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan Nomor: PR02/1/21/P.1-09 tentang organisasi dan tata kerja pada kantor pusat, berikut ini akan diuraikan pembagian tugas dan fungsi pola masing-masing bidang kerja pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan.

Berikut ini merupakan uraian tugas dan fungsi berdasarkan keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan Nomor: UM.50/47/11/P.1-11 tentang penerapan praktik *good corporate governance*.

1. Direktur Utama

Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dipimpin oleh seorang direktur utama mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan menerima petunjuk-petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada kepala RUPS kebijakan umum untuk menjalankan tugas pokok perusahaan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan KUPS.
- b. Melaksanakan tugas-tugas pokok perusahaan dan usaha lain. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan Direksi yang dilakukan oleh para Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Direktur Komersial dan pengembangan usaha membawahi 4 bidang yang terdiri dari bidang pemasaran, bidang perencanaan dan pengembangan usaha, bidang bina usaha dan bidang manajemen resiko dan manajemen mutu.

2. Direktur Komersial

Direktur komersial dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan penyelenggaraan pemasaran jasa kepelabuhan serta penyusunan Trafik Produksi dan Pendapatan (TPP).
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan usaha dan penyusunan *master plain* dan lingkungan.
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan bina usaha

- d. Pembinaan dan penyelenggaraan manajemen resiko dan manajemen mutu.

3. Direktur Operasi dan Teknik

Direktur Operasi dan Teknik membawahi 4 bidang yang terdiri dari bidang pelayanan kapal dan barang, bidang teknologi dan informasi, bidang peralatan, dan bidang fasilitas. Direktur Operasi dan Teknik mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan penyelenggaraan kapal dan barang.
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan teknologi informasi.
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan fasilitas dan pelabuhan.
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan perencanaan dan pengadaan peralatan pelabuhan.

4. Direktur Keuangan

Direktur Keuangan membawahi 4 bidang yang terdiri dari Bidang Akuntansi Manajemen, Bidang Akuntansi Keuangan, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Kemitraan dan Bina Lingkungan. Direktur Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan penyelenggaraan Akuntansi Manajemen.
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan Perbendaharaan.
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan Akuntansi Keuangan.
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan Kemitraan dan Bina Lingkungan.

5. Direktur Personalia dan Umum

Direktur Personalia dan Umum membawahi 3 bidang yang terdiri dari Bidang Perencanaan Organisasi dan SDM, bidang adm dan kesejahteraan SDM,

bidang umum atau kepala kantor pusat. Direktur personalia dan umum mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan penyelenggaraan perencanaan, pengembangan organisasi dan SDM.
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan hubungan administrasi dan kesejahteraan SDM.

6. Satuan Pengawasan Intern atau SPI

Satuan pengawasan Intern dan SPI membawahi 5 pengawas dan bidang yang terdiri dari pengawas wilayah I, Pengawas Wilayah II, Pengawas Wilayah III, Pengawas bidang khusus dan tata satuan pengawas intern. Satuan pengawas intern mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan penilaian sistem pengendalian sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian manajemen perusahaan.
- b. Penyelenggaraan pemeriksaan keuangan dan operasional perusahaan.
- c. Penyelenggaraan dokumentasi hasil pemeriksaan dan tindak lanjut temuan pemeriksaan serta ketatausahaan.
- d. Pendorong pelaksanaan pengawasan melekat yang lebih efektif diperusahaan.
- e. Pendorong pelaksanaan *good Corporate Governance*.
- f. Sebagai mitra kerja dengan komite audit dan pemeriksaan eksternal dalam mengawasi pengelolaan perusahaan.

7. Corporate secretary

Corporate secretary membawahi 3 *assistance corporate secretary (ACS)* yang terdiri dari ACS kesekretasian direksi, ACS hubungan masyarakat dan ACS

hubungan antar lembaga dan hubungan internasional. *Corporate secretary* mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Sebagai pejabat penghubung antara perusahaan dan pemegang perusahaan, regulator, lembaga lain dan publik, serta sebagai penanggung jawab sekretariat perusahaan maupun sekretariat direksi menatausahakan dokumen-dokumen perusahaan.
- b. Penyiapan pembinaan penyusunan program kerja dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan direksi.
- c. Penyiapan pembinaan penyusunan program kerja dan penyelenggaran kegiatan hubungan masyarakat.
- d. Penyiapan pembinaan, penyusunan kerja dan penyelenggaraan kegiatan hubungan antar lembaga dan hubungan internasional.
- e. Pemantauan penerapan *good corporate governace*

8. Biro hukum

Biro hukum mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Perlindungan kepentingan perusahaan dan pementauan atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan atau perundangan yang berlaku.
- b. Penelaahan peraturan perusahaan.
- c. Pemberian bantuan dan pertimbangan hukum didalam pengelolaan perusahaan.
- d. Penyimpanan dokumen hukum dan sosialisasi peraturan perusahaan atau perundangan yang berlaku.
- e. Pelaksanaan program kerja dan penyelenggaran penerapan sistem informasi manajemen dilingkungan kerja.

9. Biro logistik

Biro logistik mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan pelaksanaan program kerja pengembangan sistem logistik perusahaan.
- b. Pembinaan dan pelaksanaan program kerja bidang pengadaan perbekalan bidang teknik dan non teknik.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan program kerja bidang administrasi dan ketatausahaan pengadaan barang dan jasa.

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

1. *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance adalah merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh suatu organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-117/M-MBU/2002).

Berikut adalah Predikat Penilaian Skor *Good Corporate Governance* berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementrian BUMN No : SK-16/S-MBU/2012 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Penilaian Skor Indeks GCG Berdasarkan Keputusan Sekretaris
Kementerian BUMN No: SK-16/S-MBU/2012

Skor Penilaian	Predikat
Nilai > 85	Sangat Baik
75 < Nilai < 85	Baik
60 < Nilai < 75	Cukup Baik
50 < Nilai < 60	Kurang Baik
Nilai < 50	Sangat Kurang Baik

Sumber : Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No: SK-16/S-MBU/2012

Data berikut ini adalah skor *good corporate governance* yang diperoleh oleh PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan selama tahun 2012-2016.

Tabel 4.2
Hasil Skor Good Corporate Governance PT. Pelabuhan Indonesia I
(Persero) Medan pada Tahun 2012-2016

Tahun	Skor GCG
2012	90,35
2013	93,31
2014	94,16
2015	94,19
2016	94,23

Sumber : Capaian Skor GCG PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan

Dari data diatas pencapaian skor GCG pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan berada pada nilai “Sangat Baik” karena dari tahun ketahun mengalami peningkatan.

2. Kinerja Keuangan

Sesuai analisis yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Laporan Keuangan yang ada pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan dan dengan menganalisis Rasio Keuangan untuk mengukur Kinerja Keuangan pada perusahaan tersebut yang mana standarnya telah ditetapkan didalam Surat Keputusan Menteri BUMN No : KEP-100/MBU/2002. Rasio yang digunakan peneliti untuk mengukur Kinerja Keuangan Perusahaan menggunakan 4 Rasio,

yaitu Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas, Rasio Solvabilitas, dan tersebut dapat dijelaskan secara rinci mulai dari tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut :

a. Rasio Lancar

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula dikatakan untuk mengukur tingkat keamanan suatu perusahaan.

Perhitungan Rasio Lancar pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan untuk tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Rasio Lancar
PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan

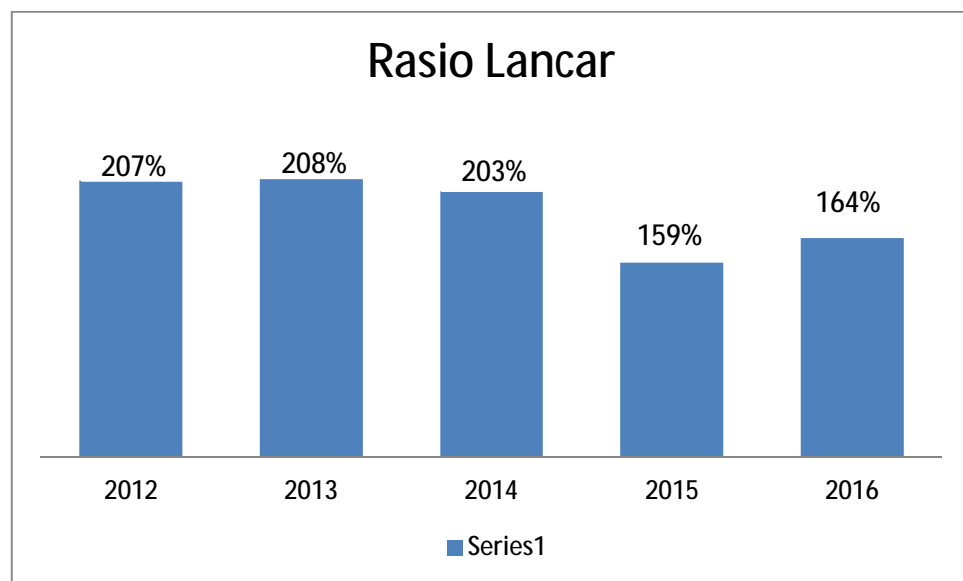
Tahun	Rasio Lancar	Standar BUMN
2012	207%	>125%
2013	208%	>125%
2014	203%	>125%
2015	159%	>125%
2016	164%	>125%

Sumber : Laporan Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Rasio Lancar untuk tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi turun naik dimana penurunan terjadi ditahun 2014 dan 2015, dan kembali naik ditahun berakhir yaitu tahun 2016. Tingkat likuid suatu perusahaan dapat dilihat dari rasio lancarnya, yang digunakan untuk memenuhi hutang lancarnya. Penurunan rasio lancar terjadi dikarenakan menurunnya jumlah aset lancar yang dimiliki perusahaan dan juga bertambahnya jumlah hutang perusahaan. Penilaian rasio lancar mengalami penurunan. Namun, dengan

demikian rasio lancar ini masih diatas Standar BUMN No : KEP-100/MBU/2002, dimana standarnya sebesar $>125\%$.

Sawir, (2009) Rasio lancar yang rendah biasanya dianggap menunjukkan terjadinya masalah dalam likuidasi, sebaliknya rasio lancar yang terlalu tinggi juga kurang bagus, karena menunjukkan banyaknya dana menganggur yang pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan laba perusahaan.



Gambar 4.2 Rasio Lancar

dapat dilihat pada gambar berbentuk column diatas Rasio Lancar yang terjadi pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan mengalami fluktuasi yaitu pada tahun 2012 rasio lancar sebesar 207.72 dan mengalami peningkatan, pada tahun 2013 sebesar 208.18 kemudian pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 203.30 dan menurun kembali di tahun 2015 sebesar 158.52 meskipun 2 tahun mengalami penurunan tetapi ditahun 2016 mengalami peningkatan kembali.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa rasio lancar yang terjadi pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan mengalami kenaikan. Tetapi untuk ukuran

kondisi rasio lancar yang diukur dengan Standar BUMN No : KEP-100/MBU/2002, ini dianggap kurang baik, karena masih dibawah Standar yang telah ditetapkan.

b. Return On Investment (ROI)

Analisis ROI menunjukkan hasil (*Return*) atas jumlah aktiva yang digunakan oleh perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelolah investasinya dan menggambarkan perbaikan atas kinerja operasi dan mengukur efesiensi dari penggunaan total aktiva untuk menghasilkan profit. Perhitungan ROI pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Return On Investment (ROI)
PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan

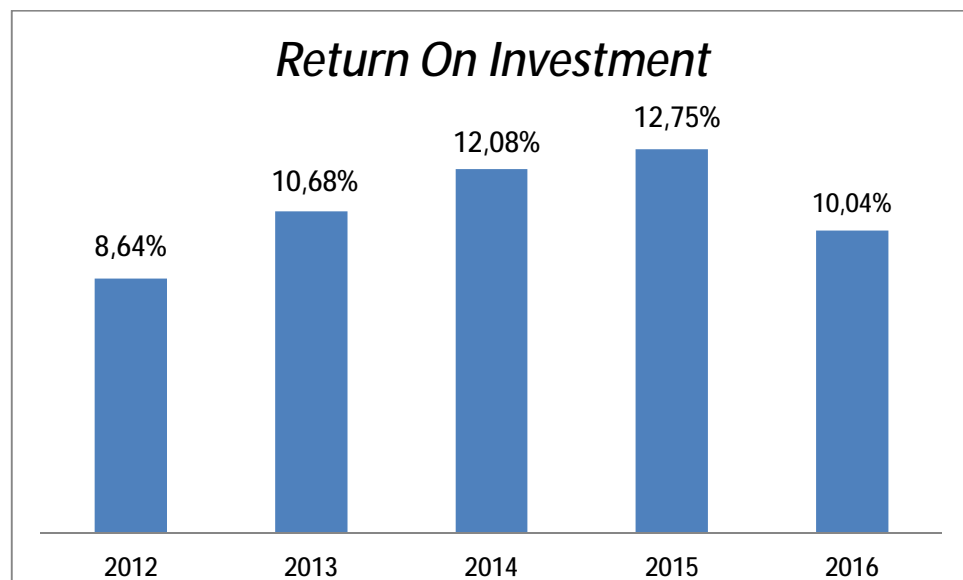
Tahun	ROI	Standar BUMN
2012	8,46%	>18%
2013	10,68%	>18%
2014	12,08%	>18%
2015	12,75%	>18%
2016	10,04%	>18%

Sumber : Laporan Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan

Dari tabel diatas diketahui bahwa *Return On Investment* dari tahun 2012 sampai dengan 2015 mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena menurunnya laba bersih perusahaan yang dikarenakan rendahnya perputaran terhadap aset perusahaan.

Hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efesiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, maka akan semakin baik bagi perusahaan. Artinya, perusahaan akan semakin

kuat, demikian pula sebaliknya semakin rendah rasio ini, maka semakin kurang baik bagi perusahaan, artinya perusahaan tingkat keuntungan tingkat pengembalian investasinya nya semakin menurun. Standar BUMN No : KEP-100/MBU/2002, dimana standarnya sebesar 18%.



Gambar 4.3 Return On Investment

Bisa dilihat pada gambar colum diatas *Return On Investment* yang terjadi pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan dari tahun ketahun mulai dari tahun 2012-2015 mengalami kenaikan, sedangkan penurunan berada pada tahun terakhir yaitu ditahun 2016 sebesar 10,04%.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa *Return On Investment* yang terjadi pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan mengalami penurunan. Dan untuk ukuran kondisi *Return On Investment* yang diukur dengan Standar BUMN No : KEP-100/MBU/2002, ini dianggap kurang baik, karena masih dibawah Standar yang telah ditetapkan, dimana Standarnya harus sebesar 18%, sedangkan capaian yang didapatkan belum mencapai skor yang telah ditetapkan.

c. Return On Equity (ROE)

Analisis ROE menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Rasio ini mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Sebab tingkat pengembalian atas modal yang ditanamkan dapat langsung diketahui dan menggambarkan keefektifan dan investasi yang dilakukan oleh *shareholders*. Perhitungan ROI pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5
Return On Equity (ROE)
PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan

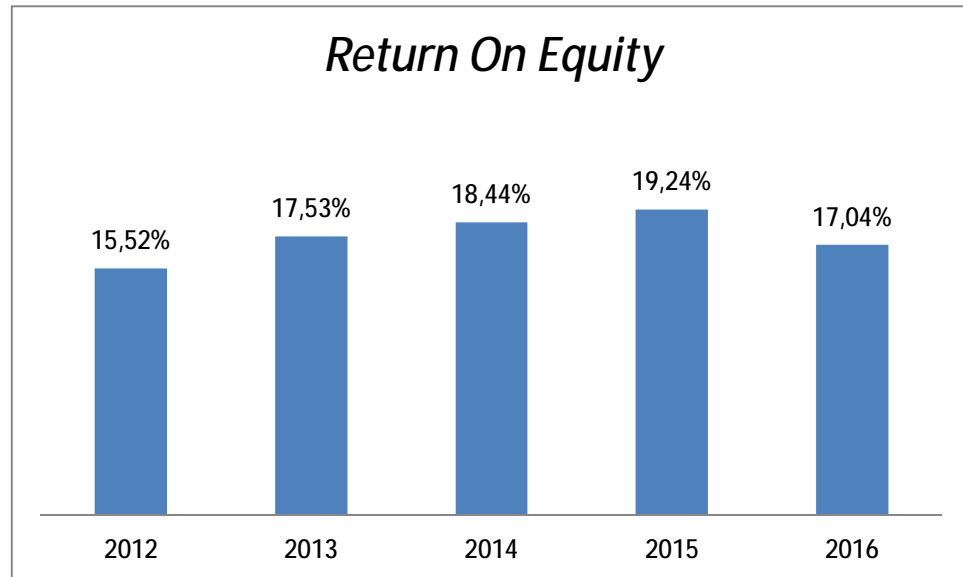
Tahun	ROE	Standar BUMN
2012	15,52%	>15%
2013	17,53%	>15%
2014	18,44%	>15%
2015	19,24%	>15%
2016	17,04%	>15%

Sumber : Laporan Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa ROE untuk tahun 2012-2015 mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2016 ROE mengalami penurunan sebesar 17,04%.

Hasil pengembalian ekuitas dilakukan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak terhadap modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan, rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi tingkat hasil pengembalian ekuitas, maka semakin baik kondisi perusahaan, yang artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat pula. Sebaliknya jika tingkat hasil pengembalian ekuitas semakin menurun, maka semakin buruk pula kondisi perusahaan, yang

artinya posisi pemilik perusahaan semakin lemah. Standar BUMN No : KEP:100/MBU/2002, dimana standartnya sebesar 15%.



Gambar 4.4 Return On Equity

Bisa dilihat pada gambar column diatas *Return On Equity* yang terjadi pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan mengalami fluktuasi peningkatan disetiap tahunnya dimulai dari tahun 2012 sebesar 15,52%, pada tahun 2013 sebesar 17,53%, tahun 2014 sebesar 18,44%, peningkatan column tertinggi yaitu tahun 2015 sebesar 19,24%, sedangkan pada tahun 2016 *ROE* kembali mengalami penurunan sebesar 17,04%.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa untuk *ROE* yang terjadi pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan untuk tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi penurunan, jika tingkat hasil pengembalian ekuitas semakin menurun, maka semakin buruk pula kondisi perusahaan. Walaupun mengalami penurunan tetapi *ROE* tetap telah memenuhi Standar BUMN No : KEP-100/MBU/2002, sebesar 15% yang artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, pada

modal yang dimiliki oleh perusahaan, karena modal perusahaan tidak banyak dibiayai oleh hutang perusahaan.

d. Total Asset Turn Over (TATO)

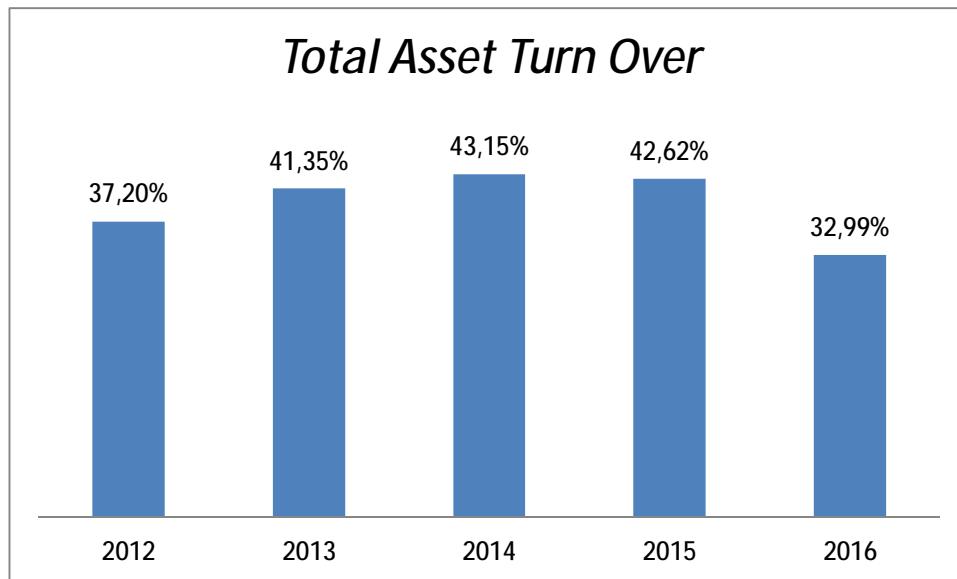
TATO yaitu ukuran untuk menilai seberapa baik perusahaan mengelola aktivitasnya dalam menghasilkan penjualan. Perhitungan TATO pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.6
Total Asset Turnover (TATO)
PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan

Tahun	TATO	Standar BUMN
2012	37,20%	>120%
2013	41,35%	>120%
2014	43,15%	>120%
2015	42,62%	>120%
2016	32,99%	>120%

Sumber : Laporan Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa TATO untuk tahun 2012-2014 mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 42,62%, dan pada tahun 2016 TATO mengalami penurunan sebesar 32,99%. *Total Asset Turn Over* (TATO) merupakan perbandingan antara penjualan bersih dengan total aktiva dalam perusahaan. Dimana rasio ini menggambarkan kecepatan perputarannya total aktiva dalam satu periode tertentu. Jadi semakin besar rasio ini maka semakin baik, dan sebaliknya jika rasio ini kecil maka akan kurang baik bagi perusahaan.



Gambar 4.5 Total Asset Turn Over

Bisa dilihat pada gambar column diatas TATO yang terjadi pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Medan tidak banyak mengalami peningkatan bahkan pada tahun terakhir TATO mengalami penurunan, pada gambar tersebut penurunan yang terjadi pada tahun terakhir yaitu tahun 2015-2016.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa TATO yang terjadi pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan tahun 2012-2016 terjadi penurunan dengan jumlah ditahun terakhir sebesar 32,99%, hal ini terjadi karena kenaikan yang cukup besar pada penjualan dibandingkan dengan kenaikan aktiva. Walaupun TATO mengalami penurunan yang diakhir tahun, tetapi jumlah skornya belum bisa mencapai Standar BUMN yang telah ditetapkan, yang artinya penilaian terhadap TATO masih dibidang kurang baik, karena belum bisa memenuhi bahkan masih jauh dari Standar BUMN yang hanya sebesar 120%.

e. Perputaran Piutang (PP)

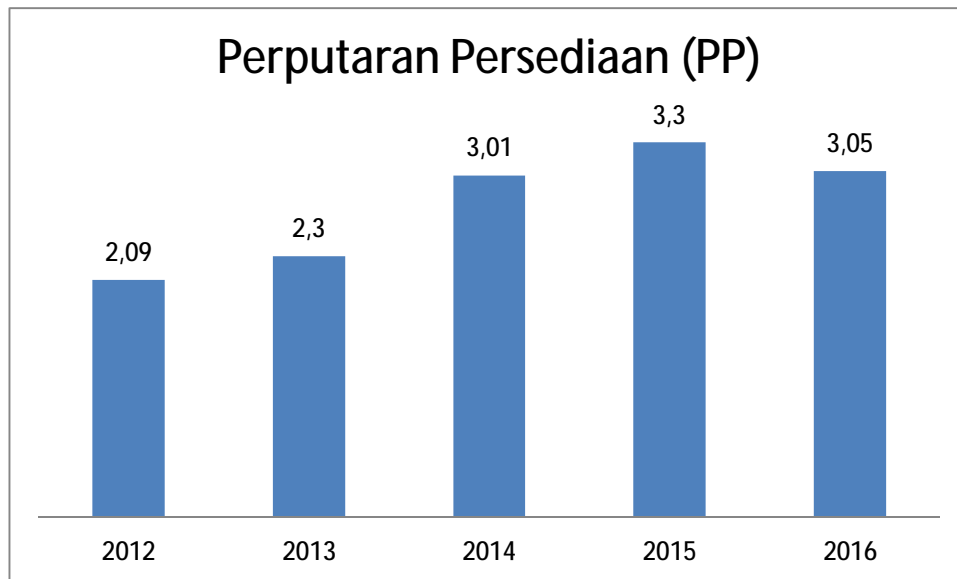
Perputaran persediaan adalah rasio efisiensi yang dihitung dengan membagi harga pokok barang yang terjual (*Cost of good sold*) dengan persediaan. Rasio ini perputaran persediaan menunjukkan seberapa efisiensi perusahaan mengatur persediannya, yaitu dengan menunjukkan beberapa kali perputaran persediaan selama satu tahun Perhitungan Perputaran Persediaan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7
Perputaran Persediaan (PP)
PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan

Tahun	PP	Standar BUMN
2012	2,09 Hari	>120%
2013	2,30 Hari	>120%
2014	3,01 Hari	>120%
2015	3,30 Hari	>120%
2016	3,05 Hari	>120%

Sumber : Laporan Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa perputaran persediaan untuk tahun 2012-2015 mengalami peningkatan disetiap tahunnya, tetapi tidak diikuti pada tahun 2016 yang mengalami penuruna sebesar 3,05 hari. Semakin kecil tingkat perputaran persediaan pada perusahaan, maka semakin kecil jumlah persediaan pada perusahaan. karena semakin kecil jumlah persediaan pada perusahaan maka semakin besar pendapatan yang diterima oleh perusahaan.



Gambar 4.6 Perputaran Persediaan

Bisa dilihat dari gambar column diatas Perputaran Persediaan yang terjadi pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan mengalami peningkatan setiap tahun dimulai dari tahun 2012-2015, pada gambar diatas column tertinggi berada ditahun 2015.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa Perputaran Pesediaan yang terjadi pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan untuk tahun 2012-2015 mengalami peningkatan, tetapi mengalami penurunan ditahun 2016. hal ini kurang baik bagi perusahaan karena meningkatnya persediaan yang dimiliki perusahaan sehingga mengakibatkan pendapatan perusahaan mengalami penurunan, walaupun demikian jika dibandingkan dengan penilaian terhadap Standar BUMN masih memenuhi standar yang mana harus lebih kecil dari 60 Hari dan masih dikatakan baik.

f. Total Modal Sendiri (TMS)

Total Modal Sendiri (TMS) adalah rasio yang menunjukkan tingkat solvabilitas perusahaan dengan anggapan bahwa semua aktiva dapat direalisasi sesuai dengan yang dilaporkan dalam neraca. Perhitungan Total Modal

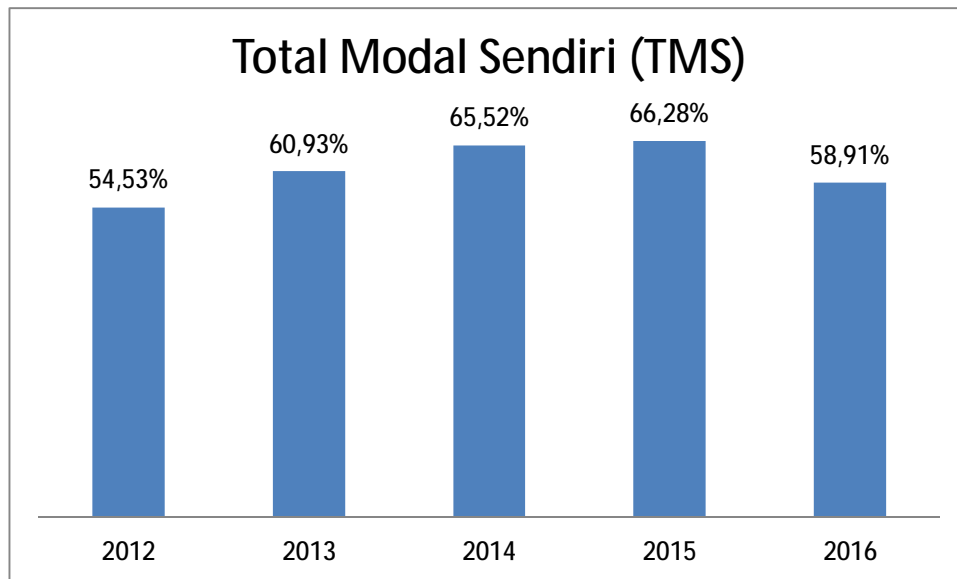
Sendiri (TMS) pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.8
Total Modal Sendiri (TMS)
PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan

Tahun	TMS	Standar BUMN
2012	54,53%	30%_s s/d 40%
2013	60,93%	30%_s s/d 40%
2014	65,52%	30%_s s/d 40%
2015	66,28%	30%_s s/d 40%
2016	58,91%	30%_s s/d 40%

Sumber : Laporan Keuangan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Rasio Modal Sendiri (TMS) untuk tahun 2012-2016 mengalami penurunan. Semakin tinggi rasio ini maka semakin kecil jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan. Jika rasio ini lebih dari 100% berarti modal sendiri melebihi total aktiva tetap dan menunjukkan aktiva tetap seluruhnya dibiayai oleh pemilik perusahaan dan sebagian dari aktiva lancar juga dibiayai oleh pemilik perusahaan. Sebaliknya jika rasio ini dibawah 100% berarti sebagian aktiva tetapnya dibiayai dengan modal pinjaman jangka pendek/jangka panjang sedangkan aktiva lancar seluruhnya dibiayai dengan modal pinjaman.



Gambar 4.7 Total Modal Sendiri

Bisa dilihat pada gambar column diatas bahwa Rasio Total Modal Sendiri (TMS) tiap tahunnya mengalami peningkatan dimulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, dan pada tahun 2016 mengalami penurunan dengan jumlah 58,91%. walaupun penurunan tidak terjadi secara signifikan, pada gambar column tersebut gambar yang menunjukkan penurunan dari tahun 2012-2016.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa rasio modal sendiri mengalami penurunan dan dalam keadaan yang kurang baik. Tetapi walaupun mengalami penurunan, rasio modal sendiri berada diatas kisaran antara 30% dan 40%, hal ini menunjukkan bahwa modal perusahaan banyak dibiayai oleh pihak eksternal perusahaan, atau perusahaan banyak didanai dari hutang-hutang perusahaan. Standar yang telah ditetapkan BUMN sebesar 30% s/d 40%.

B. Pembahasan

Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) dalam meningkatkan kinerja keuangan pada perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan

yang diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No : KEP-100/MBU/2002 yaitu :

A. Penyebab ROE, PP, TMS, TATO dan ROI mengalami penurunan.

1. *Return on equity* yang terjadi pada perusahaan ditahun 2012-2016 mengalami fluktuasi penurunan. Penurunan ini terjadi karena semakin menurunnya tingkat pengembalian ekuitas. Walaupun ROE mengalami penurunan, tetapi skornya sudah memenuhi standar ketetapan dari Menteri BUNM yaitu sebesar 15%.
2. Perputaran Persediaan yang terjadi pada perusahaan mengalami peningkatan pada tahun 2012-2015. Tetapi pada tahun 2016 PP mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena meningkatnya persediaan yang dimiliki perusahaan sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan. Walau rasio ini menurun tetapi skornya sudah memenuhi standart BUMN yaitu > 60 hari, dan masih dikatakan baik.
3. TMS yang terjadi pada perusahaan ditahun 2012 sampai dengan 2015 mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan hal ini disebabkan karena modal perusahaan banyak dibiayai oleh pihak eksternal perusahaan.
4. *Total Asset Turn Over* (TATO) yang terjadi pada perusahaan pada tahun 2012-2016 skor yang diperoleh belum memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Menteri BUMN yaitu sebesar $>120\%$. Rasio ini menunjukkan seberapa efektif pihak manajemen mengelolah seluruh aktivanya untuk menghasilkan pendapatan usaha. Menurutny rasio ini dikarenakan peningkatan total aktiva lebih besar dibandingkan

yang diikuti dengan peningkatan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Ini menunjukkan perusahaan belum mampu mengoptimalkan aktiva yang dimilikinya untuk memperoleh pendapatan. *Total Asset Turn Over* (TATO) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali harta dapat berputar dalam satu periode. Tingginya *Total Asset Turn Over* (TATO) menunjukkan efektivitas penggunaan harta perusahaan dan perputaran aktiva yang lambat menunjukkan bahwa aktiva yang dimiliki terlalu besar dibandingkan dengan kemampuan perusahaan untuk melakukan usaha.

5. Untuk *Return On Investment* (ROI) yang terjadi pada perusahaan pada tahun 2012-2016 skor yang diperoleh belum memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Menteri BUMN yaitu 18%. Rasio ini menunjukkan seberapa efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin rendah rasio ini, maka semakin kurang baik bagi perusahaan, artinya perusahaan tingkat keuntungan tingkat pengembalian investasinya semakin menurun. Kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROI mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena sedikitnya tingkat pengembalian investasi diperusahaan tersebut dan ini terjadi karena menurunnya penghasilan jumlah keuntungan dan sedikitnya ketersediaan jumlah aktiva perusahaan.

- B. *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan kinerja keuangan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan untuk tahun 2012-2016.

Pengukuran skor *Good Corporate Governance* sebagai alat untuk mengukur kinerja keuangan pada PT. Pelabuhan Indonesia I(Persero) Medan tidak menunjukkan keadaan yang sejalan. Dimana dengan skor GCG yang mengalami peningkatan, tetapi belum tentu dengan kinerja keuangan perusahaan dalam keadaan yang baik, hal ini dapat dilihat dari skor GCG yang dimiliki meningkat tiap tahunnya,tetapi untuk kinerja keuangan perusahaan masih ada yang menurun. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penerapan GCG yang baik, belum tentu dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, hal ini bertentangan dengan teori yang dinyatakan Menurut Azhar Maksu (2005), manfaat dari penerapan *Good Corporate Governance* adalah mempermudah proses pengambilan keputusan, sehingga berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. INyoman Tjager menyatakan bahwa *Corporate Governance* dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Tetapi berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang sama yang dilakukan oleh Ingrid Puspa (2014) *Corporate Governance* belum optimal dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dilihat dari skor *Good Corporate Governance* yang tidak mempengaruhi hasil kinerja keuangan perusahaan, dimana hasil kinerja keuangan perusahaan relative menurun, dan banyak yang belum memenuhi skor yang telah ditetapkan oleh Standar BUMN.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis skor *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan Kinerja Keuangan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :

1. *Good Corporate Governance* sebagai alat ukur untuk mengukur kinerja keuangan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan mengalami peningkatan, tetapi belum tentu dengan kinerja keuangan perusahaan dalam keadaan baik, hal ini dapat dilihat dari skor *Good Corporate Governance* yang meningkat tiap tahunnya tetapi kinerja keuangannya menurun.
2. Skor dari Rasio TATO dan Return On Investment (ROI) pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan belum memenuhi standart yang telah ditetapkan BUMN masing-masing sebesar >120% dan >18%
3. perusahaan yang dibiayai oleh pemilik dana dari dalam perusahaan itu sendiri.

B. Saran

Setelah memperhatikan penilaian terhadap GCG dalam meningkatkan kinerja keuangan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan yang diukur dengan Rasio Lancar, ROI, ROE, TATO, Perputaran Persediaan, dan juga TMS.

Penulis ingin memberikan masukan perihal yang perlu diperhatikan oleh pihak manajemen PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan :

1. Sebaiknya manajemen PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan agar selalu melakukan penilaian dan evaluasi kinerja. Dalam menilai kinerja sebaiknya mempertimbangkan berbagai permasalahan yang akan dihadapi, sehingga dapat mengantisipasi dan mengatasi permasalahan tersebut, sebaiknya melakukan suatu strategi untuk dapat meningkatkan laba perusahaan, dan mengefisienkan biaya-biaya operasional perusahaan.
2. PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan sebaiknya melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan mengenai *Good Corporate Governance* lebih intens.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu menambah indikator-indikator pernyataan dalam masing-masing variabel yang mampu mengarah kedalam permasalahan yang diteliti sehingga hasilnya akan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ane, La (2011). "Analisa Laporan Keuangan", Medan, Universitas Negeri Medan.
- Anton. (2012). "*Analisis Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan*" *Jurnal Akuntansi Vol.3 No. 1 Januari 2012*
- Belkaoui, Ahmed Riahi, (2007). "*Teori Akuntansi*", Buku 2, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.
- Darmawati dkk. (2005). "*Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Perusahaan*". *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol.8, No. 6, Hal 65-81.
- Effendi, Muh. Arief (2009) "*The Power of Good Corporate Governance; Teori dan Implementasi*" Salemba Empat, Jakarta.
- Febrianto, Danang, (2013). "*Analisis Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Studi Empiris Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2010 Jurnal Akuntansi*", Jakarta
- Inyoman Tjager, S.M. (2003), "*Corporate Governance Tantangan & Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*". Jakarta : Deddy Jacobus.
- Ismail, Hanif dkk. (2009). "*Sistem Pengendalian Manajemen Konsep dan Aplikasi*". Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Ikhsan, Arfan (2015). "*Teori Akuntansi*". Bandung, Citapustaka Media.
- Ikhsan, Arfan (2012). "*Metodologi Penelitian untuk Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*". Bandung, Citapustaka Media.
- Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance (KNKG). *Pedoman Umum Good Corporate Governance (GCG)*, Jakarta.

Krisnantono, D. D. (2010). *Peran Corporate Secretary sebagai Penjaga Gawang Good Corporate Governance*.

Sawir Agnes. (2005), *Corporate Governance or Good Corruption Governance*, Jakarta : PT. Gramedia.

Sugiyono, (2010). "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : PT. Alfabeta.

Sutedi, Adrian (2017). " *Good Corporate Governance*". Buku 2, Edisi 1, Sinar Grafika, Jakarta.